

**ANALISIS YURIDIS TERKAIT HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA AKIBAT PERKAWINAN
CAMPURAN**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 PK/AG/2012)

Oleh
Gede Dika Puspa Adnyana, NIM 2114101090
Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh WNI dengan WNA memiliki kompleksitas yang rumit, terkhusus pada bagian harta bersama terkait hak milik atas tanah. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui tentang bagaimana pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia, serta akibat dari perkawinan campuran terkait dengan hak milik atas tanah di Indonesia. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dijelaskan secara deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis, serta konseptual. Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pembahasan mengenai perkawinan campuran yang pada penelitian ini mengacu pada UUPA serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/AG/2012, terdapat konflik norma antara asas nasionalitas dengan putusan hakim. Hasil yang didapatkan adalah pengaturan mengenai hak atas tanah sesuai hukum positif di Indonesia telah tertera jelas pada UUPA dan telah diatur tersendiri pada Pasal-Pasal didalamnya. Perkawinan campuran antara WNI dan WNA menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah, terutama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Hak Atas Tanah, UUPA*

**JURIDICAL ANALYSIS RELATED TO LAND OWNERSHIP RIGHTS
ACCORDING TO THE MAIN AGRARIAN LAW DUE TO MIXED
MARRIAGE**

(STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 18 PK/AG/2012)

By

Gede Dika Puspa Adnyana, NIM 2114101090

Law Study Program

ABSTRACT

Mixed marriages carried out by Indonesian citizens and foreigners have complicated complexity, especially in the part of common property related to land ownership. The purpose of this study is to find out about how land rights are regulated in Indonesia, as well as the consequences of mixed marriage related to land ownership in Indonesia. The method used by the author in this study is a normative juridical method that is explained in a descriptive analytical manner, using a legislative, analytical, and conceptual approach. The sources of legal materials in this study use primary and secondary legal materials. From the issues discussed regarding mixed marriage, which in this study refers to the UUPA and Supreme Court Decision Number 18 PK/AG/2012, where there is a conflict of norms between the principle of nationality and the judge's decision. The result obtained is that the regulation of land rights in accordance with positive law in Indonesia has been clearly enshrined in the UUPA and has been regulated separately in the articles therein. Mixed marriages between Indonesian citizens and foreigners have legal consequences for the status of ownership of land rights, especially if there is no marriage agreement that regulates the separation of property.

Keywords: *Mixed Marriage, Land Rights, UUPA*